

BUNDA PAUD KABUPATEN MAGELANG Raih Anugerah Wiyata Dharma Utama

MAGELANG (KR) - Bunda Paud Kabupaten Magelang Christanti Handayani Zaenal Arifin menerima penghargaan Anugerah Wiyata Dharma Utama Tingkat Nasional Tahun 2021 dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) yang diawakikan oleh Analis Perencanaan dan Evaluasi pada Kemendikbudristek, Robbayanti Ratnaningrum.

Pada kesempatan kali ini, tidak hanya Bunda Paud Kabupaten Magelang saja yang meraih penghargaan. Bunda Paud Kecamatan Sawangan, Niken Meilani juga berhasil meraih penghargaan Kategori Anugerah Teladan II dari Mendikbudristek, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 219/P/2022.

"Semoga kegiatan ini memberikan banyak dukungan pelaksanaan program dan kegiatan Paud dalam upaya mewujudkan layanan Paud berkualitas yang holistik integratif di Kabupaten Magelang," ucap Christanti saat menerima penghargaan Anugerah Wiyata Dharma Utama dari Mendikbudristek di Pendopo Rumah Dinas Bupati Magelang, Selasa (13/9). Christanti berharap penghargaan ini bisa menjadi penyemangat dan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi Bunda Paud Kabupaten Magelang.

Analis Perencanaan dan Evaluasi pada Kemendikbudristek, Robbayanti Ratnaningrum menyampaikan, sehubungan peran Bunda Paud yang sangat strategis dalam mendorong upaya menciptakan Paud berkualitas Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbudristek telah berupaya memberikan dukungan, motivasi dan penghargaan kepada Bunda Paud yang telah memberikan kontribusi terhadap gerakan nasional Paud berkualitas. Disamping itu untuk tahun 2021 penerima apresiasi telah ditambahkan, jika sebelumnya apresiasi hanya diberikan kepada Bunda Paud Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka di tahun 2021 ini juga diberikan kepada Bunda Paud Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan. (Bag)

Santunan JKK-JHT Dari BPJS Ketenagakerjaan

MAGELANG (KR) - Walikota Magelang dr Muhammad Nur Aziz menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja yang menyebabkan meninggal dunia kepada ahli waris pekerja dari perusahaan Famili Raya dan Puri Asri Hotel. Santunan diberikan karena pekerja terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Santunan tersebut berupa santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 48 kali upah, Jaminan Hari Tua (JHT), serta Beasiswa bagi anak ahli waris yang masih berusia sekolah sampai ke perguruan tinggi.

Salah satu ahli waris yang menerima santunan beasiswa adalah anak dari almarhum Siswanto dari perusahaan Puri Asri Hotel. "Saya sangat mengapresiasi atas santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja di Indonesia, karena dengan adanya program negara tersebut, para ahli waris ataupun pekerja saat ini tidak khawatir saat menjalankan pekerjaannya, dan aman terlindungi dari berangkat hingga pulang kerja sampai di rumah kembali," kata Nur Aziz, Rabu (14/9).

Nur Aziz menambahkan, bahwa saat ini para pekerja membutuhkan adanya perlindungan yang paripurna seperti ini serta dapat memberikan jaminan jika terjadi risiko ekonomi pada pekerja jika mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia. Senada dengan walikota, Kepala BPJAMSOSTEK Magelang, Budi Pramono menjelaskan bahwa program yang diselenggarakan oleh institusinya merupakan program negara yang memang diharuskan seluruh pekerja terdaftar dalam program BPJAMSOSTEK tersebut.

"Program dari institusi kami memberikan perlindungan secara menyeluruh dan paripurna bagi para pekerja, karena seluruh hak dasar pekerja terjamin dalam perlindungan program jamsostek ini, selain itu manfaat yang didapatkan juga sangat besar," ucap Budi. (Bag)

Deklarasi Satuan Pendidikan Ramah Anak

BOYOLALI (KR) - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali mengapresiasi langkah pendidikan tingkat SMK di Banyudono yang menyelenggarakan deklarasi satuan pendidikan ramah anak (SPRA).

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali, Dinuk Prabandini mengatakan, bahwa semua satuan pendidikan di Boyolali harus menyelenggarakan sekolah ramah anak. Deklarasi sekolah berkomitmen untuk melakukan perlindungan hak anak disetiap satuan pendidikan masing-masing.

Idi Boyolali rencananya ada 27 sekolah tingkat SMA dan SMK yang akan dideklarasikan. Namun, sampai saat sudah ada 10 sekolah yang sudah mendeklarasikan sekolah ramah anak tersebut. Kalau tingkat SMP malah sudah duluan mendeklarasikan, ikatannya kepada wartawan, Kamis (15/9). Menurutnya, dalam satuan pendidikan tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak dan pemenuhan hak anak harus dilindungi sehingga anak dapat berpartisipasi.

Ia berharap, dengan adanya deklarasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sehingga dapat terwujud bahwa satuan pendidikan ini aman nyaman tanpa ada kekerasan. "Tentu kalau sekolah jauh dari kekerasan, tentu orang tua wali murid akan senang dan nyaman terhadap putra putrinya dalam melakukan pendidikan di sekolah masing-masing," jelasnya. Kepala Sekolah SMKN 1 Banyudono, Suyatna mengatakan, sesuai dengan keputusan Bupati Boyolali, bahwa sekolah SMK Banyudono ditetapkan salah satu sekolah ramah anak. "Dari keputusan Bupati Boyolali, SMK ini ditetapkan sebagai sekolah ramah anak," kata dia usai deklarasi. (R-3)



KR-Mulyawan

Suasana Deklarasi di SMKN 1 Banyudono, Boyolali.

Ganjar Beri Bantuan Rumah Keluarga Terdampak Banjir

BREBES (KR) - Sebanyak 32 keluarga yang terdampak banjir Sungai Kalikeruh Kabupaten Brebes, menerima bantuan rumah 'Omah Panel Tingkat Milik Sederhana' (OPTMIS) atau hunian vertikal dari Pemerintah Jawa Tengah. Bantuan berbasis komunitas itu diberikan melalui program tuku lemah oleh omah (beli tanah dapat rumah).

Demikian dikatakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menyerahkan bantuan rumah dari Pemprov Jawa Tengah kepada 32 keluarga di Desa Dukuhuri, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Rabu (14/9). Bantuan itu diberikan Ganjar setelah ada laporan terkait puluhan keluarga yang kehilangan rumah akibat banjir Sungai Kalikeruh pada Februari 2022.

"Kemarin ada warga yang melapor kepada Pemda, ternyata banyak rumahnya yang terbawa banjir. Ternyata juga banyak dari rumah itu yang tidak ada surat-suratnya. Hari ini ada bantuan dari pemerin-

tah yang mudah-mudahan bisa mendorong semuanya semangat," tutur Ganjar Pranowo. Formula bantuan tersebut diberikan secara kolektif melalui basis komunitas sempadan sungai Kalikeruh. Puluhan warga yang tergabung dalam komunitas membeli area tanah. Masing-masing keluarga membeli tanah seluas 18 meter persegi dengan harga Rp 7,5 juta. Kemudian Pemprov Jateng memberikan bantuan berupa rumah dua lantai sebesar Rp 50 juta/rumah.

"Saya tadi tanya beli tanahnya seharga Rp 7,5 juta. Ini yang judulnya tuku lemah oleh omah. Jadi saya minta nanti masyarakat gotong royong membantu membangun," pinta Ganjar Pranowo. Selain bantuan rumah dua lantai, pemerintah juga memberikan stimulan senilai Rp 1,8 juta untuk upah padat karya. Mayoritas penerima bantuan berprofesi sebagai pedagang. Saat bencana banjir itu rata-rata rumahnya mengalami kerusakan berat. "Ini desain

pertama yang modelnya dua lantai. Semoga bisa dimanfaatkan jangka panjang. Nanti tinggal kita tambahkan jamban dan listrik," kata Ganjar.

Deni, Ketua Komunitas Sempadan Sungai Kalikeruh, mewakili

anggota komunitas menyampaikan terima kasih atas bantuan rumah yang diberikan oleh Pemprov Jawa Tengah. Bantuan rumah tersebut sangat membantu warga setelah bencana banjir kemarin. (Bdi/Ryd)



KR-Budiono

Ganjar Pranowo saat meninjau kompleks perumahan bantuan Pemprov Jateng di Brebes.

Kantor Pemkot Magelang Segera Pindah

MAGELANG (KR) - Logo TNI, yang beberapa waktu lalu terpasang di bagian atas depan Kantor Walikota Magelang, sekarang tidak terpasang lagi.

Beberapa papan yang bertuliskan kepemilikan tanah dan bangunan, yang sejak beberapa waktu lalu terpasang di halaman Kantor Walikota Magelang, juga sudah tidak ada lagi.

Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs Joko Budiyo MM kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (14/9).

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) memfasilitasi upaya penyelesaian masalah status kepemilikan tanah dan bangunan antara

Akademi TNI dengan Pemerintah Kota Magelang.

Setelah melalui berbagai pembahasan, diperoleh kesepakatan dan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pemerintah Kota Magelang, tentang Penyerahan dan Penerimaan Hibah Tanah dan Bangunan di Kota Magelang. Penandatanganan dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (13/9) lalu.

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Aslog Panglima TNI

Mayjen TNI Haryono, Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pamudini dan Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SPd K-GH.

Kegiatan ini disaksikan Menko Polhukam Mahfud MD, dan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa maupun lainnya.

Dikatakan Joko Budiyo, proses panjang dilalui, dan proses penyelesaian aset ini akhirnya bisa diselesaikan.

Pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini sudah sepakat. Dikatakan, permasalahan aset Pemerintah Kota Magelang menjadi permasalahan nasional.

Dikatakan, pihak pertama me-

nerima pengembalian pemanfaatan aset kantor yang sekarang dimanfaatkan Pemerintah Kota Magelang.

"Pemerintah Kota Magelang nanti menyerahkan aset yang sekarang dipakai beserta bangunan fasilitas yang sudah dibangun," kata Joko Budiyo.

Pemerintah Kota Magelang menerima bantuan bangunan Gedung Wiworo Wiji Pinilih dari pihak TNI. Pemerintah Kota Magelang juga menerima hibah tanah dan bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (BPLK) milik Kementerian Keuangan RI yang ada di dekat alun-alun Kota Magelang untuk dijadikan Kantor Pemerintah Kota Magelang. (Tha)

Polres Klaten Amankan Tiga Penambang Ilegal

KLATEN (KR) - Polres Klaten tangkap tiga pelaku penambangan ilegal, dan menyita tiga unit escavator. Para tersangka melakukan usaha penambangna tanpa izin di dua lokasi terpisah.

Waka Polres Klaten Kumpul Sumiarta, Kamis (15/9) mengemukakan, para tersangka adalah Sus (55) warga Borongan, Mangrove, Klaten, AP (43) warga Tlogowatu, Kematang, Klaten, dan Sry (62) warga Jogoprayan, Gantiwarno, Klaten.

Tersangka Sus dan AP,

melakukan penambangan tanpa izin di Dukuh Brajan, Desa Tegalmulyo, Kematang, sedangkan tersangka Sry beroperasi di Dukuh Mungkur, Desa Tlogowatu, Kematang, Klaten. Dari tersangka Sry, petugas berhasil mengamankan 1 unit escavator merk Kobelco warna hijau toska model SK 200 - 8 serial number YN 12-T 1541 beserta kunci. Uang tunai Rp 4 juta rupiah, 19 kartu DO sirtu, 14 kartu DO pasir dan 1 lembar penjualan.

Dari tersangka Sus dan AP, polisi menyita barang-

bukti berupa 2 unit escavator merk Kobelco warna hijau toska, uang tunai Rp 18.350.000, 36 keplek bertuliskan nomor, sirtu PT Adi Jaya Warna Arta, dan 71 keplek bertuliskan nomor, pasir PT Adi Jaya Warna Arta.

Waka Polres menjelaskan, para pelaku melakukan penambangan dan penjualan pasir atau sirtu, tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan (IUP).

Petugas Polres Klaten menghentikan kegiatan penambangan tersebut, serta mengamankan pelaku dan barang bukti, karena pelaku tidak bisa menunjukkan izin usah pertambangan.

"Sus mengaku memiliki izin SIPB, selanjutnya kami berkoordinasi dengan ahli ESDM Jawa Tengah, ternyata SIPB Sus belum dilengkapi rencana penambangan dan persetujuan teknis lingkungan. Selanjutnya ahli ESDM mengatakan jika penambangan tersebut ilegal," kata Waka Polres. (Sit)



KR-Sri Warsiti

Barang bukti escavator diamankan di Polres Klaten.

Penghina Ustazah Imaz FZ Harus Diproses Hukum

SEMARANG (KR) - Warga Nahdliyyin yang kini menjadi senator DPD asal Jateng Dr Abdul Kho-lik SH MSi mendesak penegak hukum segera bertindak tegas kepada pihak-pihak yang telah melecehkan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Jatim, Ustazah Imaz Fatimatuz Zahra atau yang akrab disapa 'Ning' Imaz. Kasus tersebut tidak boleh dibiarkan agar tidak berulang yang berimbas pesantren akan terus dirugikan.

Dalam keterangan pers, hari Rabu (14/9), Abdul Kholik mengaku, prihatin, akhir-akhir ini ada upaya stigmatisasi terhadap keberadaan lembaga pendidikan pesantren. Terakhir tampak jelas pada indikasi kasus penghinaan terhadap Ustazah Imaz Fatimatuz Zahra, selaku pengasuh Ponpes Lirboyo.

"Sebelumnya sudah muncul banyak kasus yang mengarah pada usaha mendiskreditkan pesantren seperti santri yang dianggap calon teroris, hingga kasus kekerasan pesantren. Padahal dalam hal kekerasan sebenarnya terjadi di banyak lembaga pendidikan lain seperti kasus kekerasan di IPDN, kasus akademi kelautan, bahkan terakhir kekerasan terjadi di tubuh institusi kepolisian. Ini artinya pola umum yang masih terjadi di masyarakat kita," katanya.

Menurut Kholik, pesantren adalah institusi pendidikan yang sudah ada sejak zaman kolonial. Lembaga ini menjadi pusat pendidikan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. "Karena itu saya menolak keras tendensi yang mengarah pada upaya merendahkan institusi pe-

santren. Adanya kasus penghinaan kepada tokoh pesantren saya lihat cenderung dilatarbelakangi soal persaingan politik. Hal seperti ini harus dihentikan. Pesantren harus didukung oleh semua pihak dalam menjalankan pendidikannya karena tujuannya untuk mencerdaskan bangsa," kata Kholik.

Bagi Abdul Kholik, Lirboyo adalah pesantren tua dan besar. Santrinya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mereka sudah menjadi ulama dan kiai di berbagai daerah. Mereka kini sudah menjadi panutan masyarakat. Dalam sejarahnya pesantren Lirboyo adalah salah satu pesantren utama di kalangan Nahdliyyin. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh KH Abdul Karim yang pada mulanya bertempat tinggal di Desa Lirboyo, Kecamatan Mojojoto,

Kediri, Jawa Timur pada tahun 1910 M. Sebelum menetap di Desa Lirboyo, beliau mengajar di Ponpes Tebu Ireng asuhan KH Hasyim Asy'ari yang juga menjadi teman sebayanya ketika berguru di Syaikhona Kholil Bangkalan. KH Abdul Karim menikah dengan Nyai Khodijah binti KH Sholeh, Banjarmelati. Dan sejak pernikahan itulah KH Abdul Karim menetap di Desa Lirboyo, Kediri. Beralihnya KH Abdul Karim dari

Tebuireng ke Desa Lirboyo disebabkan oleh adanya dorongan dari mertuanya (K.H. Sholeh Banjarmelati) dengan harapan agar syiar dan dakwah Islam menjadi lebih luas. Saat ini Pesantren Lirboyo berada di bawah pimpinan K.H. M Anwar Manshur. Pesantren ini adalah pesantren salaf, yakni pesantren yang menekankan pada kemampuan membaca dan mengkaji kitab-kitab salaf (kitab kuning) untuk pembelajaran sehari-hari. (Isi)



KR-Istimewa

Dr Abdul Kholik SH MSi